

**LAPORAN
KEUANGAN
BP3TKI (UPT BP2MI)
BANDUNG**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40275
Telpon/Fax : 022-7336965/7333212
E-mail : bp3tkibdg@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung (UPT-BP2MI) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung (UPT-BP2MI) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung (UPT-BP2MI). Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, Januari 2021

Kepala BP3TKI Bandung,



Dis. Ade Kusnadi, M.M.
NIP. 196512121992031003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
F. Pengungkapan Penting Lainnya	36
VI. Lampiran dan Daftar	



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung (UPT-BP2MI) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, Januari 2021

Kepala BP3TKI Bandung,



Drs. Ade Kusnadi, M.M.
NIP. 196512121992031003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung (UPT-BP2MI) Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp17.117.104 atau mencapai 0,00 persen. BP3TKI Bandung (UPT-BP2MI) tidak ada estimasi Anggaran Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara pada periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.728.735.648 atau mencapai 98.64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.876.783.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.152.550.280 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp139.622.123; Aset Tetap (netto) sebesar Rp11.878.265.157 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp97.848.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp14.341.819 dan Rp12.138.208.461.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.995.067.090 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp10.995.067.090. Defisit Kegiatan Non

Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.605.119.256 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp12.600.186.346.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp13.995.430.426 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp Rp12.600.186.346 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp20.564.737 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.722.399.644 sehingga Ekuitas Entitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp12.138.208.461.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BP3TKI BANDUNG (UPT BP2MI) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN TA 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Anggaran	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	17.117.104	0,00	70.626.600
JUMLAH PENDAPATAN		-	17.117.104	0,00	70.626.600
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	4.429.205.000	4.401.547.659	99,38	4.493.177.820
Belanja Barang	B.3	6.447.578.000	6.327.187.989	98,13	9.931.225.568
Belanja Modal	B.4	-	-	0,00	17.382.775
JUMLAH BELANJA		10.876.783.000	10.728.735.648	98,64	14.441.786.163

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR BP3TKI BANDUNG (UPT BP2MI)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1	-	87.131.200
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2	-	(435.656)
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	C.3	-	86.695.544
Persediaan	C.4	139.622.123	1.753.209.358
JUMLAH ASET LANCAR		139.622.123	1.839.904.902
ASET TETAP			
Tanah	C.5	8.573.442.000	8.573.442.000
Peralatan dan Mesin	C.6	5.634.065.741	5.789.216.741
Gedung dan Bangunan	C.7	3.337.836.167	3.330.148.167
Akumulasi Penyusutan	C.8	(5.667.078.751)	(5.475.797.148)
JUMLAH ASET TETAP		11.878.265.157	12.217.009.760
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.9	110.084.772	34.953.572
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.10	(73.269.772)	(174.768)
<i>Piutang Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	C.11	36.815.000	34.778.804
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		36.815.000	34.778.804
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.12	987.599.000	1.001.564.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(889.751.000)	(913.277.857)
JUMLAH ASET TETAP		97.848.000	88.286.143
JUMLAH ASET		12.152.550.280	14.179.979.609
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	14.341.819	184.549.183
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		14.341.819	184.549.183
JUMLAH KEWAJIBAN		14.341.819	184.549.183
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.15	12.138.208.461	13.995.430.426
JUMLAH EKUITAS		12.138.208.461	13.995.430.426
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.152.550.280	14.179.979.609

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BP3TKI BANDUNG (UPT BP2MI)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.1	4.233.131.716	4.507.278.737
Beban Persediaan	D.2	86.240.335	271.281.750
Beban Barang dan Jasa	D.3	5.190.452.867	6.994.334.475
Beban Pemeliharaan	D.4	238.448.789	452.566.028
Beban Perjalanan Dinas	D.5	813.605.452	2.210.514.899
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	360.528.583	578.286.085
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.7	72.659.348	50.424
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		10.995.067.090	15.014.312.398
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN		(10.995.067.090)	(15.014.312.398)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	6.121.844	85.421.972
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	1.611.241.100	3.336.425
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non - Operasional		(1.605.119.256)	82.085.547
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(12.600.186.346)	(14.932.226.851)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(12.600.186.346)	(14.932.226.851)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR BP3TKI BANDUNG (UPT BP2MI)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
EKUITAS AWAL	E.1	13.995.430.426	14.257.637.965
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(12.600.186.346)	(14.932.226.851)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	20.564.737	288.150.749
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	298.823.000
Koreksi Nila Aset Tetap Non Revaluasi		20.564.737	(10.672.251)
JUMLAH		20.564.737	288.150.749
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	10.722.399.644	14.381.868.563
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(1.857.221.965)	(262.207.539)
EKUITAS AKHIR	E.6	12.138.208.461	13.995.430.426

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BP3TKI Bandung

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung (UPT BP2MI) sebelumnya disebut Balai Antar Kerja Antar Negara (**BALAI AKAN**) yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 23 Tahun 1984. Kemudian berubah menjadi Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Setelah itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 sesuai amanat UU No. 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2019 sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkomitmen dengan Visi **“Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera”**, untuk mewujudkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
2. Meningkatkan pelayanan penempatan TKI yang mudah, murah, cepat dan aman;
3. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan TKI;
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BP3TKI Bandung (UPT BP2MI). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari BP3TKI Bandung (UPT BP2MI). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan secara khusus direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapata-LO pada BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi (TP / TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP / TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri ;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6. Capaian Output

1. Pencapaian Capaian Output Strategis Satker BP3TKI Bandung

Selama periode Tahun Anggaran 2020, output strategis yang telah dicapai oleh Satker BP3TKI Bandung adalah sebagai berikut:

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
1	06.3894.001	Peta Potensi TKLN Berbasis Permintaan	330.760.000,00	327.890.728,00	99,13	13	13	100,00
2	06.3894.002	CTKI/TKI yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural	1.384.508.000,00	1.317.553.770,00	95,16	22.220	12.138	54,63
3	06.3894.003	CTKI/TKI yang Terlindungi	27.685.000,00	26.787.000,00	96,76	12	9	75,00
4	06.3894.004	Fasilitasi Layanan Terpadu Satu Atap	100.754.000,00	99.439.881,00	98,70	7	7	100,00
5	06.3908.970	Layanan Dkungan Manajemen Satker	606.101.000,00	597.969.967,00	98,66	1	1	100,00
6	06.3908.994	Layanan Dkungan Manajemen Satker	8.428.975.000,00	8.359.074.432,00	99,17	1	1	100,00

2. Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19 di Satker BP3TKI Bandung

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada Satker BP3TKI Bandung melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk program-program sebagai berikut:

1. Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp111.667.000;
2. Realisasi pengadaan dari belanja penanganan pandemi COVID-19 tersebut berupa alat kesehatan, obat dan bahan medis habis pakai, pulsa, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp103.266.566.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode yang berjalan, BP3TKI Bandung (UPT-BP2MI) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya *Refocussing* dan pemotongan anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan yang merubah anggaran DIPA awal pada Tahun Anggaran 2020 BP3TKI Bandung (UPT BP2MI). Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja Pegawai	4.739.145.000	4.429.205.000
Belanja Barang	8.231.505.000	6.447.578.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	12.970.650.000	10.876.783.000

Realisasi
Pendapatan
Rp17.117.104

B. 1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.117.104 atau mencapai 0,00 persen. Tidak ada estimasi pendapatan yang ditetapkan pada BP3TKI Bandung. Pendapatan BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) berasal dari penerimaan Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	17.117.104	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	17.117.104	-

Pendapatan penerimaan dengan rincian terdiri dari :

No	NTB	NTPN	Jumlah
1	200109952207	9A0E67QLTJF51O8O	1.000.000
2	200207045219	A22110N9UUUV002U	1.000.000
3	200309275911	7BBDE61QTUG8AS5K	1.000.000
4	200409319013	D6B441JNEPND07UH	1.000.000
5	200508010570	2435048VU9HF7R02	1.000.000
6	200609060476	EDB178N3DEGB3PFL	1.000.000
7	200709615019	DF77C1JNEQ081815	1.000.000
8	200807175838	4CC187QLTK3TBIBI	1.000.000
9	000000701947	65D540N9UVHECHDI	1.221.000
10	000000718980	5E77961QTUVOQGPO	518.000
11	000000734247	ECDA77QLTK4HKHS6	718.200
12	000000744637	A84518N3DEMU1I2F	66.904
13	000000759651	F812F0N9UVHECKVK	720.000
14	000000773500	B5B1748VU9R00L44	860.000
15	200909730378	25AC58N3DEPCDM2P	1.000.000
16	201009246457	CD9526U8DPN12TIT	1.000.000
18	000000124002	C6BB83CIEFGSFM59	613.000
19	000000134074	BD7400N9UVPN8MDK	400.000
20	201109653975	C17F88N3DEV7URPV	1.000.000
21	201208298970	DD44C1JNEQF6FU09	1.000.000
Jumlah			17.117.104

Realisasi Pendapatan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan 75,76 persen dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan pendapatan hanya berupa TGR Piutang lancar setiap bulan dan angsuran pembayaran TGR Serta tidak ada pendapatan lainnya yaitu meliputi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai/Barang TAYL.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019

URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	-	67.177.600	(100,00)
Pendapatan Lain-lain	17.117.104	3.449.000	396,29
Jumlah	17.117.104	70.626.600	(75,76)

Realisasi Belanja
Negara
Rp10.728.735.648

B. 2 Belanja

Realisasi Belanja instansi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.728.735.648 atau 98,64 persen dari anggaran belanja sebesar Rp10.876.783.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

URAIAN	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.429.205.000	4.401.547.659	99,38%
Belanja Barang	6.447.578.000	6.327.187.989	98,13%
Belanja Modal	-	-	0,00%
Total Belanja Kotor	10.876.783.000	10.728.735.648	98,64%
Pengembalian Belanja	-	-	0,00%
Jumlah	10.876.783.000	10.728.735.648	98,64%

Dibandingkan periode 31 Desember 2019 realisasi belanja periode yang berakhir belanja pada tahun sebelumnya 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 25,71 persen dibandingkan realisasi dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak adanya pembayaran THR Tunjangan Kinerja;
2. Tidak ada kegiatan tambahan operasional unit pos layanan di Kab./Kota di Jawa Barat, tidak ada kegiatan PMI Purna dan tidak ada program sosialisasi penempatan dan perlindungan CPMI;
3. Tidak ada belanja modal untuk sarana prasarana LTSP dan layanan kantor BP3TKI Bandung;
4. Adanya Refocussing dan Pematangan Anggaran;
5. Ada Surat Edaran Deputi Penempatan BP2MI No. 4 Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penghentian sementara Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Tujuan Penempatan.

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan periode yang berakhir 31 Desember 2019

URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.401.547.659	4.493.177.820	(2,04)
Belanja Barang	6.327.187.989	9.931.225.568	(36,29)
Belanja Modal	-	17.382.775	(100,00)
Jumlah	10.728.735.648	14.441.786.163	(25,71)

*Belanja Pegawai
Rp4.401.547.659*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.401.547.659 dan Rp4.493.177.820 Belanja Pegawai adalah belanja atas

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 2,04 persen dari realisasi belanja pada untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak adanya pembayaran THR Tunjangan Kinerja dan
2. Adanya pegawai pensiun, pensiun meninggal dan pegawai pindah.

Perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan TA. 2019

URAIAN	REALISASI PER 31 DES 2020	REALISASI PER 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.217.982.976	2.196.061.206	1,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.400	31.850	(1,41)
Belanja Uang Makan PNS	363.748.000	312.175.000	16,52
Uang Lembur PNS	16.039.000	80.239.000	(80,01)
Tunjangan Kinerja PNS	1.803.746.413	1.909.826.383	(5,55)
Jumlah Belanja Kotor	4.401.547.789	4.498.333.439	(2,15)
Pengembalian Belanja Pegawai	(130)	(5.155.619)	(100,00)
Jumlah Belanja	4.401.547.659	4.493.177.820	(2,04)

Belanja Barang
Rp6.327.187.989

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan TA. 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.327.187.989 dan Rp9.931.225.568. Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan 36,29 persen dari Realisasi Belanja Barang periode yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan tidak ada kegiatan TKI Purna sehingga belanja jasa dan biaya perjalanan dinas turun cukup signifikan karena adanya Refocussing dan pemotongan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Perbandingan Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan TA. 2019

URAIAN	Untuk periode yang berakhir 31 Des 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.678.617.747	2.911.094.365	(7,99)
Belanja Barang Non Operasional	648.747.127	1.631.748.605	(60,24)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	82.889.460	236.782.500	(64,99)
Belanja Jasa	1.864.879.414	2.463.159.004	(24,29)
Belanja Pemeliharaan	238.448.789	482.858.257	(50,62)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	813.605.452	2.212.560.698	(63,23)
Jumlah Belanja	6.327.187.989	9.938.203.429	(36,33)
Pengembalian	0	6.977.861	(100,00)
Jumlah Belanja	6.327.187.989	9.931.225.568	(36,29)

Adapun rincian belanja barang untuk keperluan Covid-19 adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Barang Periode Berkahir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan	
			Kuitansi di BKU	Nama Toko
a	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			
1	Vitacimin	1.650.000	001254	Toko Obat Gumilang
2	Masker Scuba	252.000	001233	Surya Storage
3	Jasa Pencetakan Masker Scuba	120.000	001273	Talitha Sublimatio
4	Sablon dan Conveksi Masker Scuba	1.958.000	001304	Giant Sablon
5	Faceshield P4TKI dan LTSA Cirebon	136.000	001320	Devolks Store
6	Faceshield P4TKI Bekasi	136.000	001321	Devolks Store
7	Faceshield P4TKI Sukabumi	51.000	001322	Devolks Store
8	Faceshield BP3TKI Bandung & Subang	442.000	001325	Devolks Store
9	Hand Sanitizer dan Masker	270.000	001499	Inti Health Store
10	Faceshield LTSA Subang	75.000	001635	Setia Abadi
11	Masker Scuba BP3TKI Bandung	90.000	001685	P16 Digital Print
12	Vitamin P4TKI Sukabumi	159.000	002115	Shopee
13	Handsanitizer, Masker dan Faceshield	600.000	002288	Inti Health Store
14	Faceshield BP3TKI Bandung	500.000	002298	Inti Health Store
15	Vitamin BP3TKI Bandung	650.000	002438	Toko Pandu
16	Faceshield BP3TKI Bandung	150.000	002368	Inti Health Store
17	Faceshield BP3TKI Bandung	150.000	002369	Inti Health Store
18	Lisensi Aplikasi Video Convergence	216.000	002526	Shopee
19	Faceshield BP3TKI Bandung	200.000	002547	Inti Health Store
20	Desinfektan BP3TKI Bandung	4.953.566	002653	PT. Parit Padang Global
21	Video Convergence	216.000	002729	Shopee
22	Arkrilik Screen	1.200.000	001882	Valentine
23	Pengadaan Pandemi Covid-19	44.764.500	13/KWT/VS	Viesta Setia
b	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19			
1	Transport lokal Covid-19	16.200.000	001883	Pegawai BP3TKI WFO
Jumlah		75.139.066		

Rincian Belanja Barang Periode Berkahir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan	
			Kuitansi di BKU	Nama Toko
b	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			
1	Rapid Test 5 pegawai P4TKI Sukabumi	750.000	002669	Klinik Jalur Farma
2	Rapid Test 3 pegawai LTSA Karawang	450.000	002701	Klinik Siti Azaria
3	PCR Test 1 pegawai	1.100.000	002716	Omni Hospital
4	Rapid Test BP3TKI Bandung, Cirebon	1.327.500	002764	RS. Mitra Plumbon
5	Rapid Test 1 pegawai LTSA Kab. Bandung	150.000	002775	Kimia Farma Lab.
6	Rapid Test 1 pegawai LTSA Kab. Bandung	150.000	002776	Kimia Farma Lab.
7	Rapid Test P4TKI Bekasi	2.025.000	002778	Klinik Pratama Maryamah
8	Rapid Test LTSA Subang	300.000	002788	Klinik Almira
9	Rapid Test BP3TKI Bandung	5.700.000	002801	RSU Pindad
10	Swab Antigen 4 pegawai BP3TKI Bandung	1.480.000	002802	RSU Pindad
11	Swab Antigen P4TKI Bekasi, Karawang	3.600.000	002803	Klinik Djati Medika
12	Swab Antigen 37 Pegawai BP3TKI Bandung	6.660.000	002804	RS. Edelweiss
13	Swab Antigen P4TKI Sukabumi	560.000	002805	Klinik Jalur Farma
14	PCR Test 1 pegawai an. Tieke Indria P	975.000	002806	Paramitha
15	PCR Test 1 pegawai an. Sekar Titisani S	975.000	002807	Paramitha
16	PCR Test 1 pegawai an. Aditya Dewanto	900.000	002808	RS. Al Islam
17	Rapid Test an. Aditya Dewanto	150.000	002809	Klinik Bhakti Kencana
18	Swab Antigen an. Rian B.C. Manalu	250.000	002810	Klinik Siti Azaria
Jumlah		27.502.500		

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp17.382.775. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu untuk periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan Tahun 2019 hal ini disebabkan BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) tidak merealisasikan belanja modal berupa alat kantor karena tidak ada anggaran untuk Belanja Modal Tahun 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan Tahun 2019

URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	17.382.775	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0	17.382.775	-100,00
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	0	17.382.775	-100,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp87.131.200 Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

No	Nama	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	87.131.200
Jumlah		-	87.131.200

C.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan (Rp435.656).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Bagian Lancar Tagihan
TP/ TGR (Netto) Rp0

C.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp86.695.544. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

No	Nama	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Bagian Lancar Taihan TP/TGR (Netto)	-	86.695.544
Jumlah		-	86.695.544

Persediaan
Rp139.622.123

C.4. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp139.622.123 dan Rp1.753.209.358.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019
Barang Konsumsi	139.622.123	1.753.209.358
Jumlah	139.622.123	1.753.209.358

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah Rp8.573.442.000

C.5. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.573.442.000 dan Rp8.573.442.000, tidak ada mutasi tanah pada tahun 2020.

Tanah seluas 943,00 M² terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 587 Rt.03 Rw.09 Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	943 m2	Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40287	8.573.442.000
Jumlah			8.573.442.000

Peralatan dan Mesin
Rp5.634.065.741

C.6. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp5.634.065.741 dan Rp5.789.216.741. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	5.789.216.741
Mutasi Tambah:	11.979.000
Pembelian	
Transfer masuk	11.979.000
Reklasifikasi masuk	
Mutasi Kurang:	167.130.000
Extrakomptable	0
Reklasifikasi keluar	0
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	167.130.000
Saldo per 31 Desember 2020	5.634.065.741
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-5.368.744.699
Nilai Buku per 31 Desember 2020	265.321.042

➤ Mutasi Tambah peralatan dan mesin berupa :

- Aset Tetap Yang Digunakan transaksi peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 senilai Rp11.979.000 :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Thermomrter (Alat Pengukur Suhu Badan)	6	Rp 1.996.500	Rp 11.979.000	BA.146/SU-PPK/V/2020 Tgl 23-06-2020
JUMLAH				Rp 11.979.000	

➤ Mutasi Kurang peralatan dan mesin berupa :

- Aset Tetap Yang tidak Digunakan transaksi peralatan dan mesin Per 31 Desember 2020 senilai Rp167.130.000 :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Rp167.130.000	Rp167.130.000	Kendaraan di Hentikan penggunaannya
JUMLAH				Rp167.130.000	

Gedung dan Bangunan
Rp3.337.836.167

C.7. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah Rp3.337.836.167 dan Rp3.330.148.167.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	3.330.148.167
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Revaluasi	7.688.000
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2020	3.337.836.167
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	298.334.052
Nilai Buku per 31 Desember 2020	3.039.502.115

Adanya transaksi penambahan yaitu Perhitungan Revaluasi dari KPKNL Bandung untuk kantor Gedung dan Bangunan BP3TKI Bandung.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(5.667.078.751)

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing (Rp5.667.078.751) dan (Rp5.475.797.148). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	8.573.442.000	0	8.573.442.000
2	Peralatan dan Mesin	5.634.065.741	5.368.744.699	265.321.042
3	Gedung dan Bangunan	3.337.836.167	298.334.052	3.039.502.115
Akumulasi Penyusutan		17.545.343.908	5.667.078.751	11.878.265.157

Piutang Tagihan TP/TGR
Rp110.084.772

C.9. Piutang Tagihan TP/TGR

Saldo Tagihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp110.084.772 dan Rp34.953.572. Rangkuman Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (Penurunan)
Piutang Tagihan TP/TGR	110.084.772	34.953.572	214,95
Jumlah	110.084.772	34.953.572	214,95

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
(Rp73.269.772)

C.10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar (Rp73.269.772) dan (Rp174.768). Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Uraian	30 Nov 2020	31 Des 2019	kenaikan (penurunan)
Jangka Panjang	73.269.772	174.768	41824,02
Jumlah	73.269.772	174.768	41824,02

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/TGR
(Netto) Rp36.815.000

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp36.815.000 dan Rp34.778.804.

Rangkuman Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2020 tersaji pada table berikut :

Rincian Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan (penurunan)	%
Tagihan TP/TGR (Netto)	36.815.000	34.778.804	2.036.196	5,85
Jumlah	36.815.000	34.778.804	2.036.196	5,85

C.12. Aset Lain-lain

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp987.599.000 dan Rp1.001.564.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	1.001.564.000
Mutasi tambah:	167.130.000
- Reklasifikasi dari Aset tetap	167.130.000
Mutasi kurang:	(181.095.000)
- Penghentian Penggunaan BMN	(13.965.000)
- Penghapusan BMN	(167.130.000)
Saldo per 31 Desember 2020	987.599.000
Akumulasi Penyusutan	(889.751.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	97.848.000

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan adalah reklasifikasi atau penghentian kendaraan roda 4 (empat) atau mobil yang sudah dalam kondisi hilang dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp167.130.000;
- Penghapusan Alat Angkutan Darat Bermotor berupa kendaraan roda 4 (empat) atau mobil senilai R.167.130.000;
- Penghentian Alat Rumah Tangga berupa A.C. Split Rp7.000.000;
- Penghentian Alat Rumah Tangga berupa mesin berupa kursi besi/metal Rp6.965.000;

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini ..

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp889.751.000)

C.13. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah masing-masing (Rp889.751.000) dan (Rp913.277.857). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun. Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	(987.599.000)	(889.751.000)	(97.848.000)
Jumlah	(987.599.000)	(889.751.000)	(97.848.000)

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp14.341.819

C.14. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp14.341.819 dan Rp184.549.183. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BP3TKI Bandung (UPT BP2MI) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang kepada Pihak ketiga	14.341.819	Kekurangan Gaji Pegawai, Listrik, Telpon, Air dan Internet
Total	14.341.819	

Ekuitas
Rp12.138.208.461

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.138.208.461 dan Rp13.995.430.426. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Pegawai
Rp4.233.131.716

D.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.233.131.716 dan Rp4.507.278.737. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2020	31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.804.455.740	1.785.756.780	1,05
Beban Pembulatan Gaji PNS	31.474	27.263	15,45
Beban Tunjangan-Tunjangan	414.186.684	407.915.694	1,54
Beban Uang Makan	339.804.000	312.633.100	8,69
Beban Lembur	16.039.000	77.834.000	(79,39)
Beban Pegawai (Tunjangan Kinerja)	1.658.614.818	1.923.111.900	(13,75)
Jumlah	4.233.131.716	4.507.278.737	(6,08)

Beban Persediaan
Rp86.240.335

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp86.240.335 dan Rp271.281.750. Beban Persediaan merupakan Beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2020	30 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	86.240.335	271.281.750	(68,21)
Jumlah	86.240.335	271.281.750	(68,21)

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.190.452.867 dan Rp6.994.334.475. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi disebabkan berkurangnya pengiriman surat dinas pos pusat secara TNDE, belanja bahan menurun karena pelaporan secara *online* sehingga pengadaan dan penjilidan hanya sedikit, honor operasional satuan kerja karena kegiatan sosialiasi tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19, tidak adanya barang non operasional lainnya dan langganan air karena adanya kebijakan WFH sehingga menurun yg signifikan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2020	31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.461.478.794	2.504.953.649	(1,74)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.574.887	8.580.716	(23,38)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	151.000.000	397.560.000	(62,02)
Beban Barang Operasional - Penangan Covid-19	59.564.066	0	100,00
Beban Bahan	599.744.627	1.360.373.605	(55,91)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	21.500.000	258.650.000	(91,69)
Beban Barang Non Operasional - Penangan Covid	27.502.500	0	100,00
Beban Langganan Listrik	147.885.818	189.301.630	(21,88)
Beban Langganan Telepon	3.706.052	7.917.859	(53,19)
Beban Langganan Air	386.300	4.967.100	(92,22)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	70.899.823	70.785.116	0,16
Beban Jasa Sewa	1.177.950.000	1.247.904.800	(5,61)
Beban Jasa Profesi	362.600.000	943.340.000	(61,56)
Beban Jasa Lainnya	99.660.000	0	100,00
Jumlah	5.190.452.867	6.994.334.475	(25,79)

Adapun rincian beban barang dan jasa untuk keperluan Covid-19 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode Berkahir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan	
			Kuitansi di BKU	Nama Toko
a	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			
1	Vitacimin	1.650.000	001254	Toko Obat Gumilang
2	Masker Scuba	252.000	001233	Surya Storage
3	Jasa Pencetakan Masker Scuba	120.000	001273	Talitha Sublimatio
4	Sablon dan Conveksi Masker Scuba	1.958.000	001304	Giant Sablon
5	Faceshield P4TKI dan LTSA Cirebon	136.000	001320	Devolks Store
6	Faceshield P4TKI Bekasi	136.000	001321	Devolks Store
7	Faceshield P4TKI Sukabumi	51.000	001322	Devolks Store
8	Faceshield BP3TKI Bandung & Subang	442.000	001325	Devolks Store
9	Hand Sanitizer dan Masker	270.000	001499	Inti Health Store
10	Faceshield LTSA Subang	75.000	001635	Setia Abadi
11	Masker Scuba BP3TKI Bandung	90.000	001685	P16 Digital Print
12	Vitamin P4TKI Sukabumi	159.000	002115	Shopee
13	Handsanitizer, Masker dan Faceshield	600.000	002288	Inti Health Store
14	Faceshield BP3TKI Bandung	500.000	002298	Inti Health Store
15	Vitamin BP3TKI Bandung	650.000	002438	Toko Pandu
16	Faceshield BP3TKI Bandung	150.000	002368	Inti Health Store
17	Faceshield BP3TKI Bandung	150.000	002369	Inti Health Store
18	Lisensi Aplikasi Video Convergence	216.000	002526	Shopee
19	Faceshield BP3TKI Bandung	200.000	002547	Inti Health Store
20	Desinfektan BP3TKI Bandung	4.953.566	002653	PT. Parit Padang Global
21	Video Convergence	216.000	002729	Shopee
22	Arkrilik Screen	1.200.000	001882	Valentine
23	Pengadaan Penanganan Covid-19	44.764.500	13/KWT/VS	CV. Viesta Setia
Jumlah		58.939.066		

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode Berkahir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan	
			Kuitansi di BKU	Nama Toko
b	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			
1	Rapid Test 5 pegawai P4TKI Sukabumi	750.000	002669	Klinik Jalur Farma
2	Rapid Test 3 pegawai LTSA Karawang	450.000	002701	Klinik Siti Azaria
3	PCR Test 1 pegawai	1.100.000	002716	Omni Hospital
4	Rapid Test BP3TKI Bandung, Cirebon	1.327.500	002764	RS. Mitra Plumbon
5	Rapid Test 1 pegawai LTSA Kab. Bandung	150.000	002775	Kimia Farma Lab.
6	Rapid Test 1 pegawai LTSA Kab. Bandung	150.000	002776	Kimia Farma Lab.
7	Rapid Test P4TKI Bekasi	2.025.000	002778	Klinik Pratama Maryamah
8	Rapid Test LTSA Subang	300.000	002788	Klinik Almira
9	Rapid Test BP3TKI Bandung	5.700.000	002801	RSU Pindad
10	Swab Antigen 4 pegawai BP3TKI Bandung	1.480.000	002802	RSU Pindad
11	Swab Antigen P4TKI Bekasi, Karawang	3.600.000	002803	Klinik Djati Medika
12	Swab Antigen 37 Pegawai BP3TKI Bandung	6.660.000	002804	RS. Edelweiss
13	Swab Antigen P4TKI Sukabumi	560.000	002805	Klinik Jalur Farma
14	PCR Test 1 pegawai an. Tiek Indria P	975.000	002806	Paramitha
15	PCR Test 1 pegawai an. Sekar Titisani S	975.000	002807	Paramitha
16	PCR Test 1 pegawai an. Aditya Dewanto	900.000	002808	RS. Al Islam
17	Rapid Test an. Aditya Dewanto	150.000	002809	Klinik Bhakti Kencana
18	Swab Antigen an. Rian B.C. Manalu	250.000	002810	Klinik Siti Azaria
Jumlah		27.502.500		

Beban
Pemeliharaan
Rp238.448.789

D.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp238.448.789 dan Rp452.566.028. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan disebabkan karena penurunan alokasi anggaran pemeliharaan dan sebagian jumlah Aset yang dipelihara lebih sedikit karena dampak dari penghentian Aset dari penggunaannya pada Aplikasi Simak BMN. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.065.000	165.755.771	(74,02)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	195.383.789	286.810.257	(31,88)
Jumlah	238.448.789	452.566.028	(47,31)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp813.605.452

D.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp813.605.452 dan Rp2.210.514.899. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan Beban Perjalanan Dinas karena tidak adanya kegiatan sosialisasi serta berkurangnya karena adanya pandemi Covid-19 dan adanya *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Rincian Beban Perjalanan Dinas periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	398.385.452	889.779.964	(55,23)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	158.820.000	424.225.000	(62,56)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	72.611.627	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas - Penangan Pandemi COVID-19	16.200.000	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	240.200.000	823.898.308	(70,85)
Jumlah	813.605.452	2.210.514.899	(63,19)

Beban Penyusutan
Dan Amortisasi
Rp360.528.583

D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp360.528.583 dan Rp578.286.085. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 NOVEMBER 2020	30 NOVEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	288.257.931	464.541.842	(37,95)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	69.894.652	109.971.743	(36,44)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.376.000	3.772.500	(37,02)
Jumlah Penyusutan	360.528.583	578.286.085	(37,66)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	360.528.583	578.286.085	(37,66)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp72.659.348

D.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp72.659.348 dan Rp50.424. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 DEEMBER 2020	31 DEEMBER 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	72.659.348	50.424	143.996,76
Jumlah	72.659.348	50.424	143.996,76

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp13.995.430.426

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas untuk pada tanggal 1 Januari 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.995.430.426 dan Rp14.257.637.965.

Defisit LO

Rp12.600.186.346

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp12.600.186.346 dan Rp14.932.226.851. Defisit LO merupakan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Aset

Tetap/Lainnya Non

Revaluasi

Rp20.564.737

E.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp20.564.737 dan Rp10.672.251. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin (AC, Split dan Kursi, dll.)	8.626.880
Peralatan dan Mesin (Mobil)	11.937.857
Jumlah	20.564.737

Transaksi Antar

Entitas

Rp10.722.399.644

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.722.399.644 dan Rp14.381.868.563. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	31 DES 2020	31 DES 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.728.735.648	14.441.786.163
Diterima ke Entitas Lain	(17.117.104)	(70.626.600)
Transfer Masuk	10.781.100	10.709.000
Jumlah	10.722.399.644	14.381.868.563

E.4.1 Diterima dari Entitas Lainnya (DDEL/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan Kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 DKEL sebesar Rp10.728.735.648 dan Rp14.441.786.163 sedangkan DDEL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp17.117.104 dan Rp70.626.600.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL, KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.781.100 dan Rp10.709.000 terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai	
			31 DES 2020	31 DES 2019
1	Peralatan dan Mesin	Sekretaris Utama BNP2TKI	10,781,100	10,709,000
	Jumlah		10,781,100	10,709,000

Tidak ada transfer keluar untuk periode berakhir 31 Desember 2020 karena tidak ada perpindahan Aset maupun Persediaan.

Ekuitas Akhir
Rp12.138.208,461

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.138.208.461 dan Rp13.995.430.426.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting yang tercatat setelah tanggal neraca

1.1 Barang Persediaan KTKLN dan Perangkat Pendukungnya

Berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, TKI yang berangkat bekerja ke luar negeri wajib mempunyai Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang merupakan identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. KTKLN diterbitkan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah BNP2TKI. Dalam rangka penerbitan KTKLN untuk TKI, sejak Tahun 2008 BNP2TKI melakukan pengadaan KTKLN serta *supplies* KTKLN dalam rangka pencetakan KTKLN.

Pada akhir tahun 2014, Presiden R.I. memberikan perintah secara lisan yang tidak mewajibkan lagi KTKLN bagi TKI untuk memenuhi aspirasi TKI. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian e-KTKLN, sejak bulan Agustus 2015 tidak lagi dilakukan pencetakan/penerbitan KTKLN bagi TKI. KTKLN diberikan dalam bentuk KTKLN Elektronik (e-KTKLN) yang menggunakan sidik jari *biometric* TKI dan terhubung dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Akibat tidak digunakan lagi KTKLN maka dapat dikategorikan sebagai Persediaan Usang yaitu persediaan yang secara fisik masih bagus namun tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Berikut rincian KTKLN, *Supplies* KTKLN berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik :

No	Uraian Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	HDP-600 Retransfer Film #084033	19	2.205.500	41.904.500
2	HDP-5000 YMCK (500 images) 84051	82	2.420.000	198.440.000
3	HDP-5000 Hologram Overlaminat Customized	98	2.068.000	202.664.000
4	HDP-5000 Film #84053 (Des-14)	62	1.881.000	116.622.000
5	HDP-600 Cleaning Kit #081593#	4	528.770	2.115.080
6	HDP.5000 Cleaning Kit #089200	78	539.000	42.042.000
7	HDP-600 Color Ribon YMCK #084011#	47	2.502.500	117.617.500
8	HDP-600 Overlaminat Customized	69	2.502.500	172.672.500
9	KTKLN	24.453	29.260	715.494.780
Jumlah		24.912	14.676.530	1.609.572.360

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia nomor : B.449/KA/IX/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Persetujuan Penghapusan/Pemusnahan/Pelelangan terhadap KTKLN dan Perangkat Pendukungnya dan Surat Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Pasifik BP2MI nomor : B.201/PEN/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Proses Penghapusan KTKLN dan Perangkat Pendukungnya. Salah satu pointnya adalah agar KTKLN dan *Overlamine* harus dimusnakan/dihapuskan dikarenakan terdapat logo BNP2TKI untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) UPT BP2MI Bandung telah mengajukan Permohonan Penghapusan/Pemusnahan Barang Persediaan tersebut untuk dapat dilakukan Penghapusan/Pemusnahan Barang Persediaan dimaksud sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Barang (KPB) UPT BP2MI Bandung nomor : B.908/UPTBP2MI-6/XI/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan/Pemusnahan Barang persediaan KTKLN dan *Overlamine* pada UPT BP2MI Bandung.

F.2 REVALUASI ASET

Penilaian kembali atas aset tetap dimiliki oleh perusahaan (entitas). Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat dievaluasi

F.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung adalah Bank BRI A/C 0005-01-001570-30-5 a.n. Bendahara Pengeluaran BP3TKI Bandung.

Surat Pengesahan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran BP3TKI Bandung dari KPPN Bandung I sesuai surat Nomor : S-297/WPB.13/KP.0121/2011 tanggal 24 Januari 2011.

F.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- a. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP.82/KA/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP.356/KA/XII/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan BNP2TKI Tahun Anggaran 2020.
- b. Keputusan Kepala Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung. Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan Penerima Barang/Jasa dan Pengelola Barang Milik Negara pada Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung maka pada tanggal 01 Januari 2020 telah dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan. Perubahan Pengelola Keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 di BP3TKI sebagai berikut :

No	Jabatan	Semula	Menjadi
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Tugiyarto, S.Sos,	Drs. Ade Kusnadi, M.M.